



Strategi Komunikasi Yayasan Daksa Banua dalam Mengadvokasi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Banjarmasin

Arya Putra Darmadi¹, Bachruddin Ali Akhmad²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin

Surel: arya26501@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa penyandang disabilitas di Banjarmasin masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses hak-hak dasar mereka, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan publik yang inklusif, dengan dukungan kebijakan dan bantuan alat bantu yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh Yayasan Daksa Banua dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di Banjarmasin, serta untuk mengidentifikasi dampak dan hambatan yang dihadapi dalam proses advokasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Yayasan Daksa Banua, observasi langsung, dan dokumentasi kegiatan advokasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Daksa Banua menerapkan strategi komunikasi berbasis komunitas dan kelembagaan, melalui audiensi kepada pemangku kebijakan, kampanye media sosial, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan edukatif kepada masyarakat umum. Strategi ini mampu menghasilkan dampak positif berupa peningkatan kesadaran publik, pengaruh terhadap kebijakan daerah, dan penguatan solidaritas dalam komunitas disabilitas. Namun, yayasan juga menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas sensorik, dan minimnya dukungan dari media arus utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang tepat dan inklusif dapat menjadi alat efektif dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas komunikasi organisasi, kemitraan dengan stakeholder, serta perluasan jangkauan advokasi agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara lebih merata.

Kata Kunci: Advokasi, Hak Disabilitas, Strategi Komunikasi, Yayasan Daksa Banjarmasin

Cara Sitasi: Darmadi, A. P., & Akhmad, B. A. (2025). Strategi Komunikasi Yayasan Daksa Banua dalam Mengadvokasi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Banjarmasin. *JURNAL PERSUASI*, 2(3), 127-136.

PENDAHULUAN

Yayasan Daksa Banua merupakan organisasi masyarakat sipil yang telah aktif sejak tahun 2016 dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa, di wilayah Kalimantan Selatan. Organisasi ini menempatkan advokasi strategis sebagai fokus utama kegiatannya, dengan target utama para pemangku kebijakan serta peningkatan kesadaran publik mengenai isu-isu disabilitas. Melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan berbasis komunitas, Yayasan Daksa Banua secara konsisten mendorong implementasi kebijakan yang ramah disabilitas, seperti Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018, yang menjadi landasan hukum penting dalam penyediaan layanan yang adil dan merata bagi penyandang disabilitas. Selain itu, yayasan secara aktif menginisiasi audiensi dengan berbagai instansi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum yang masih banyak mengalami keterbatasan dan kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya ini tidak hanya bertujuan pada perubahan kebijakan formal, tetapi juga mengedukasi para pemangku kepentingan yang selama ini masih memiliki pemahaman terbatas mengenai kebutuhan dan hak penyandang disabilitas, sehingga advokasi yang dilakukan tidak hanya bersifat *top-down* tetapi juga partisipatif dan membangun kesadaran bersama.

Di lapangan, Yayasan Daksa Banua menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketidaksesuaian alat bantu yang tersedia dengan kebutuhan pengguna, minimnya fasilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB), serta kurangnya akses informasi yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas resmi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan betapa kompleks dan sistemiknya masalah yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas di daerah tersebut. Meskipun demikian, keberhasilan yang telah dicapai oleh yayasan, seperti perbaikan akses layanan kesehatan dan dorongan terhadap kebijakan inklusif, menjadi bukti nyata bahwa advokasi yang sistematis dan komunikasi yang efektif mampu mendorong perubahan, walaupun keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada penguatan strategi komunikasi yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan serta keterlibatan aktif berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas disabilitas itu sendiri dalam mewujudkan keadilan sosial.

Secara lebih luas, pengakuan hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menjadi acuan internasional bagi negara-negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut secara setara. Namun, kenyataannya, penyandang disabilitas di seluruh dunia, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar. Di Indonesia sendiri, meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi regulasi ini masih jauh dari harapan. Masih terdapat kesenjangan besar dalam hal alokasi anggaran, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan, selain juga adanya stigma dan diskriminasi sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, peran advokasi menjadi sangat penting sebagai jembatan yang menghubungkan regulasi dengan praktik nyata di lapangan. Strategi komunikasi organisasi, terutama yang dilakukan oleh Yayasan Daksa Banua, memainkan peran sentral dalam menyuarkan aspirasi penyandang disabilitas, memperluas jangkauan pesan

advokasi, serta membangun dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui penggunaan media sosial, kampanye publik, dialog langsung dengan pejabat pemerintah, dan keterlibatan dalam forum-forum kebijakan, yayasan berupaya meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Yayasan Daksa Banua menjadi contoh konkret dari penerapan praktik advokasi yang berbasiskan strategi komunikasi yang efektif dan inklusif dalam konteks lokal di Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi komunikasi advokasi yang digunakan oleh yayasan, mengevaluasi dampak yang telah dicapai, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih menghambat efektivitas pendekatan tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi advokasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moloeng, 2017) objek penelitian ini adalah berfokus pada bentuk dan pola komunikasi yang digunakan Yayasan Daksa Banua dalam menyampaikan pesan advokasi, media dan saluran komunikasi yang dipilih dalam kampanye advokasi, efektivitas strategi komunikasi, serta dampak dan hambatan dari pelaksanaan advokasi tersebut. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Informan penelitian ini dibagi menjadi dua, informan kunci yang terdiri dari ketua dan sekretaris yayasan, kemudian informan pendukung yang terdiri dari tiga orang tua dari anak disabilitas yang juga merupakan anggota Yayasan Daksa Banua. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Yayasan Daksa Banua merupakan sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Wawan Kurniawan untuk mewadahi para penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa, di wilayah Kalimantan Selatan. Yayasan ini beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai RT 34 No. 45, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendirian Yayasan Daksa Banua berawal dari kegelisahan para orang tua siswa penyandang tuna daksa atas terbatasnya layanan pendidikan dan terapi di SLB YPLB Banjarmasin. Kegelisahan tersebut melahirkan Kerukunan Orang Tua-Anak Berkebutuhan Khusus YPLB pada tahun 2014. Namun, setelah menyampaikan berbagai surat keluhan kepada pihak legislatif dan Ombudsman, tanggapan yang diterima belum memuaskan.



Gambar 1. Logo Yayasan Daksa Banua
Sumber: <https://disabilitas-daksabanua.com/> 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh Yayasan Daksa Banua dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di Banjarmasin, khususnya terkait layanan kesehatan. Strategi ini melibatkan berbagai aktor internal seperti ketua yayasan, sekretaris, anggota, dan orang tua penyandang disabilitas, yang menunjukkan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Isi pesan advokasi mereka berfokus pada permintaan perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap layanan kesehatan yang inklusif, dengan menekankan pentingnya fasilitas khusus seperti rumah sakit dan Posyandu disabilitas. Komunikasi juga dilakukan melalui hubungan langsung dengan pihak rumah sakit serta pendekatan interpersonal yang kuat, termasuk komunikasi digital melalui WhatsApp, Zoom, Facebook, TikTok, dan YouTube, yang mulai dioptimalkan setelah pandemi COVID-19. Target utama dari pesan advokasi adalah pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, karena dianggap sebagai pemegang mandat pelaksanaan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Meskipun terdapat beberapa capaian seperti hadirnya Rumah Sakit Samarihum sebagai fasilitas layanan disabilitas, Wawan Kurniawan dan Elly Rahma menilai bahwa secara umum efek dari advokasi belum menunjukkan perubahan signifikan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Tantangan seperti kesulitan mendapatkan obat-obatan dan terapi yang tidak efektif menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Oleh karena itu, Yayasan Daksa Banua menilai bahwa strategi komunikasi advokasi harus terus dijalankan secara konsisten dan diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis agar hak-hak penyandang disabilitas dapat benar-benar terpenuhi.

Yayasan Daksa Banua menetapkan layanan kesehatan sebagai isu strategis utama dalam advokasinya, karena kelompok disabilitas berat sangat membutuhkan akses terapi dan layanan medis yang berkelanjutan. Pemilihan isu ini berbasis pada urgensi kebutuhan komunitas dan relevansi kebijakan lokal, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas. Yayasan juga berupaya membangun opini publik melalui pendekatan berbasis hak dan data, seperti penggunaan Undang-Undang Disabilitas sebagai landasan moral, serta pemanfaatan data internal penyandang disabilitas untuk mendorong perencanaan kebijakan berbasis bukti. Dalam memahami sistem kebijakan publik, yayasan menunjukkan fleksibilitas dengan menyesuaikan isu advokasi sesuai momentum politik

dan tren kebijakan. Mereka aktif membangun koalisi dengan organisasi lain seperti PPDI dan HWDI untuk memperkuat posisi tawar, namun tetap mempertahankan identitas dan visi lokal. Strategi taktis yayasan mencakup audiensi ke DPRD, koordinasi dengan pemerintah daerah, penyampaian aspirasi ke Ombudsman, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pesan advokasi. Strategi ini menunjukkan pemahaman atas dinamika kebijakan dan perlunya pendekatan multipihak. Yayasan Daksa Banua juga berupaya memengaruhi pembuat kebijakan melalui pendekatan emosional dan kolaboratif, sambil secara konsisten memantau hasil gerakan mereka. Meskipun perubahan terjadi perlahan, seperti penyediaan fasilitas aksesibilitas di ruang publik, yayasan tetap menghargai langkah kecil tersebut sebagai kemajuan yang perlu diikuti dengan pemantauan terus-menerus. Mereka menekankan bahwa advokasi bersifat berkelanjutan dan membutuhkan komitmen jangka panjang, termasuk dalam memperjuangkan hadirnya Posyandu dan rumah sakit khusus disabilitas di Banjarmasin.

Pembahasan

Strategi komunikasi advokasi yang dijalankan oleh Yayasan Daksa Banua sangat selaras dengan model komunikasi strategis yang dikemukakan oleh (Middleton, 2002), yang menekankan lima unsur utama dalam proses komunikasi, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Dalam pelaksanaannya, ketua yayasan, Bapak Wawan Kurniawan, mengambil peran sebagai komunikator utama yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat, terutama karena pengalaman pribadinya sebagai orang tua dari anak penyandang disabilitas. Pengalaman ini tidak hanya memberikan keautentikan dalam penyampaian pesan, tetapi juga menambahkan dimensi emosional yang mampu menarik empati dan perhatian audiens, khususnya para pemangku kebijakan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Yayasan Daksa Banua berfokus pada pemenuhan hak-hak layanan kesehatan yang inklusif dan terpadu bagi penyandang disabilitas berat, menekankan kebutuhan konkret seperti fasilitas khusus, posyandu disabilitas, dan pentingnya pendataan yang akurat. Dalam menyampaikan pesan tersebut, yayasan menggunakan kombinasi media komunikasi digital dan tatap muka, yang menunjukkan adaptasi strategi terhadap situasi pasca-pandemi COVID-19, di mana keterbatasan interaksi langsung digantikan oleh saluran digital seperti media sosial dan audiensi virtual. Meski demikian, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga maupun pendanaan, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan media digital yang optimal.

Komunikan utama dari strategi komunikasi ini adalah pemerintah daerah, legislatif, dan dinas teknis yang memiliki kewenangan membuat serta mengimplementasikan kebijakan publik. Namun, komunikasi tidak hanya diarahkan secara vertikal kepada pemangku kebijakan, melainkan juga secara horizontal kepada masyarakat luas dan komunitas disabilitas sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dan dukungan sosial. Pendekatan ini selaras dengan teori komunikasi dua arah yang partisipatif seperti yang dijelaskan oleh (Grunig, 1984), di mana interaksi yang melibatkan feedback dan dialog menjadi aspek penting untuk mencapai perubahan sosial. Efek dari komunikasi advokasi ini sejauh ini baru terlihat pada tingkat kognitif dan afektif, yaitu peningkatan kesadaran dan simpati publik terhadap isu disabilitas serta respons awal dari pemerintah

dalam bentuk bantuan dan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pengadaan kursi roda elektrik dan pengembangan unit layanan khusus disabilitas. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya mencapai ranah konatif yang melibatkan perubahan perilaku atau tindakan nyata yang berdampak pada kebijakan struktural yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Karenanya, penguatan dan kesinambungan strategi komunikasi advokasi menjadi sangat penting agar Yayasan Daksa Banua dapat mendorong perubahan kebijakan yang sistemik dan permanen. Hal ini menuntut pendekatan komunikasi yang tidak hanya fokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pembangunan jaringan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapasitas internal, serta inovasi dalam penggunaan media dan metode komunikasi. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan dapat lebih efektif menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan, serta memperkuat dukungan sosial dan politik yang menjadi fondasi perubahan kebijakan inklusif di tingkat lokal maupun nasional. Keseluruhan temuan ini mempertegas relevansi teori komunikasi strategis Middleton dan model komunikasi dua arah Grunig dan Hunt dalam konteks advokasi hak disabilitas di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan strategi komunikasi advokasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah (Middleton, 2002).



Gambar 2. Sesi terapi Raihan, usia 5 tahun, terapi di Rumah Sakit
Sumber: dokumentasi penelitian, 2025

Yayasan Daksa Banua melaksanakan advokasi melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pemilihan isu strategis yang menysasar problem struktural penyandang

disabilitas berat, khususnya dalam layanan kesehatan dan terapi. Pemilihan isu ini didasarkan pada urgensi kebutuhan di lapangan, ketimpangan antara regulasi dan implementasi, serta dimensi kemanusiaan dan ketidakadilan sosial yang menyertainya. Sebagaimana diungkapkan (Suharto, Edi, 2009), advokasi harus berbasis pada isu yang diakui masyarakat, memiliki peluang kebijakan, dan mendesak secara sosial. Yayasan menilai bahwa akses layanan kesehatan inklusif adalah kebutuhan nyata dan merupakan celah kebijakan yang belum optimal, meskipun sudah diatur dalam PP No. 70 Tahun 2019. Pada tahap membangun opini dan fakta, Yayasan Daksa Banua menggabungkan pengalaman personal, data empirik, dan dasar hukum untuk mendorong kesadaran publik dan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Ini selaras dengan prinsip *evidence-based advocacy* yang menekankan pentingnya data dalam membangun legitimasi advokasi (Chapman & Wameyo, 2001). Pengalaman ketua yayasan sebagai orang tua anak disabilitas dijadikan narasi yang kuat dan menyentuh empati publik, diperkuat oleh rujukan pada regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016. Media sosial dan media massa dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membingkai isu disabilitas sebagai persoalan hak, bukan sekadar belas kasihan.

Pendekatan ini mencerminkan strategi komunikasi advokasi yang bertujuan mengubah persepsi publik dan mendorong respons kebijakan (Wilcox, 2001). Selain itu, yayasan menerapkan pendekatan advokasi kolaboratif dengan memahami dinamika sistem kebijakan publik dan membangun koalisi strategis. Mereka menjalin kemitraan dengan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah untuk memperkuat tekanan politik dan memperluas dukungan. Pendekatan ini sejalan dengan teori jaringan advokasi yang menekankan pentingnya aliansi untuk memperbesar dampak advokasi (Keck & Sikkink, 1998). Yayasan juga secara aktif merancang sasaran dan taktik, melakukan audiensi rutin dengan pemerintah, dan memantau implementasi kebijakan, seperti evaluasi layanan di RS Jiwa Sambang Lihum. Konsistensi pemantauan ini mencerminkan praktik *policy feedback*, yaitu keterlibatan berkelanjutan dalam proses kebijakan agar dampak advokasi tetap terjaga (Weiss, 1995).

Yayasan Daksa Banua menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan advokasi dan komunikasi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang mencakup hambatan struktural, kultural, dan birokratis. Salah satu kendala utama adalah pola pikir masyarakat dan pemangku kebijakan yang masih melihat disabilitas sebagai nasib tak terelakkan, bukan sebagai isu hak asasi yang harus ditangani negara secara aktif, sebagaimana diuraikan dalam teori hambatan budaya terhadap perubahan sosial oleh (Hofstede, 2001). Selain itu, tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar instansi pemerintah, seperti antara Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan, menghambat koordinasi dan implementasi kebijakan yang seharusnya bersifat lintas sektor dan inklusif (Sabatier & Weible, 2014). Persoalan birokrasi dan kurangnya sinergi antar level pemerintahan, baik kota maupun provinsi, memperlihatkan tantangan dalam konsistensi pelaksanaan kebijakan meskipun regulasi seperti Perda telah ada. Hambatan internal seperti keterbatasan kapasitas personal dan sumber daya juga menambah beban yayasan dalam memperjuangkan isu disabilitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain pendekatan komunikasi strategis, Yayasan Daksa Banua memerlukan strategi advokasi jangka panjang yang adaptif terhadap dinamika politik dan sosial (Fowler, 2000).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi advokasi yang diterapkan oleh Yayasan Daksa Banua dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Banjarmasin bersifat sistematis, terarah, dan berbasis komunitas. Yayasan mengombinasikan pendekatan personal yang mengandalkan legitimasi pengalaman pendiri sebagai orang tua anak disabilitas dengan pendekatan kelembagaan melalui audiensi, surat terbuka, serta partisipasi dalam forum publik seperti *musrenbang* dan *RPJMD*. Komunikasi disesuaikan dengan karakteristik audiens: formal dan diplomatis untuk pemangku kebijakan, serta emosional dan edukatif untuk komunitas disabilitas dan masyarakat umum. Penggunaan media sosial dan kolaborasi dengan media lokal menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pesan advokasi. Strategi ini telah menghasilkan dampak positif, antara lain dalam bentuk respons kebijakan yang lebih inklusif seperti pengadaan kursi roda elektrik dan inisiasi layanan khusus disabilitas, serta peningkatan kesadaran publik dan internal komunitas disabilitas terhadap hak-hak mereka. Komunitas disabilitas mulai menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dalam proses advokasi. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan komunikasi advokasi, seperti keterbatasan akses informasi bagi disabilitas dengan hambatan komunikasi (tuna rungu/netra), minimnya dukungan dari media arus utama, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta belum optimalnya partisipasi dari kelompok disabilitas yang belum tergabung dalam komunitas yayasan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas advokasi ke depan, strategi komunikasi yang digunakan perlu diperkuat secara inklusif dan berkelanjutan dengan memperluas kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas digital, serta memperluas jangkauan komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi strategis yang dikemukakan (Middleton, 2002), bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh sinergi antara komunikator, isi pesan, saluran, komunikan, dan efek yang dihasilkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Bachrudin Ali Akhmad selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini; kepada Bapak Muhammad Nizar Hidayat, S.IP., M.A selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP ULM; serta kepada Bapak Wawan Kurniawan selaku Ketua Yayasan Daksa Banua, Ibu Elly, dan para orang tua anggota Yayasan Daksa Banua yang telah membuka ruang, memberikan kepercayaan, serta mendampingi penulis dalam proses penelitian dan pengabdian, kontribusi dan kebaikan mereka menjadi bagian penting dari perjalanan akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518-11526
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Black, A. (2006). *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi.
- Brady, N. C., Bruce, S., Goldman, A., Erickson, K., Mineo, B., Ogletree, B. T., ... & Wilkinson, K. (2016). Communication services and supports for individuals with severe disabilities: Guidance for assessment and intervention. *American journal on intellectual and developmental disabilities*, 121(2), 121-138
- Brolan, C. E., Boyle, F. M., Dean, J. H., Taylor Gomez, M., Ware, R. S., & Lennox, N. G. (2012). Health advocacy: a vital step in attaining human rights for adults with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(11), 1087-1097.
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chapman, J & Wameyo, A. (2001). *Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study*. ActionAid.
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Espine, Sheila. (2008). *Developing advocacy for children and young people*. United Kingdom: Jessica kingsley publisher
- Fowler, A. (2000). *NGO Futures: Beyond Aid: NGDO Values and the Fourth Position*. *Third World Quarterly*, 2(21), 589–603.
- Grunig, J. E. (1984). *Managing Public Relations*. : Holt, Rinehart and Winston.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.
- Keck, M. E & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*.
- Lasswell, H. D. (1960). The structure and function of communication in society. *The communication of ideas*, 37(1), 136-139.
- Makinuddin & Sasongko (2006). *Analisis sosial bersaksi dalam advokasi irigasi*. Bandung: Akatiga
- MELATI, A. S. (2024). *PENGARUH KAMPANYE SAYA PILIH BUMI PROGRAM JERSEY REBORN DI INSTAGRAM TERHADAP PARTISIPAN MENDAUR ULANG LIMBAH FASHION KHALAYAK (Survei Pada Followers@sayapilihbumi)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana-Buncit).
- Middleton, M. (2002). *Social Marketing: A Strategic Approach to Social Change*. SAGE Publications.
- Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. *Harvard business review*, 72(1), 107-114.
- Moloeng, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nadlifuddin, M. I., Azizah, U. N., Nurfatika, L. A. S., Hikmah, B. W., & Yanti, D. (2024). Analisis Kebijakan Rehabilitasi pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Indocharis. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 6(2).

- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas. Indonesian Center for Law and Policy Studies.
- Rustan, A. S., & Hakki, N. (2017). Pengantar ilmu komunikasi. Deepublish.
- Sabatier, P. A & Weible, C. M. (2014). *Theories of the Policy Process (3rd ed.)*. Westview Press.
- Samsu, S. M. (2017). METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sangadji, dkk. (2010). Metodologi Penelitian --- Pendekatan Praktis dalam Penelitian. (Yogyakarta: Andi Off).
- Sugiyono, P. D. (2014). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia .
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Triyono, Agus. (2021). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. (Jakarta: Bintang Pustaka Madani)
- Website Satu Data Kota Banjarmasin. 2022. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 Tahun 2022. <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/1086014c-64aa-401c-b2f9-58041cba24f1> diakses pada 30 Januari 2025.
- Website Resmi Yayasan Daksa Banua <https://disabilitas-daksabanua.com/> diakses pada 30 Januari 2025
- Weiss, C. H. (1995). The Four “I’s” of School Reform: How Interests, Ideology, Information, and Institution Affect Teachers and Principals. *Harvard Educational Review*, 65(4), 571–592.
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. Lentera, 17(1).
- Wilcox, D. L. (2001). *Public Relations: Strategies and Tactics (6th ed.)*. Allyn & Bacon.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 20(2).